

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2002 *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian filosofis dan sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta,
- Achmad Chulaemi, 1993, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pindahannya*, FH-Undip, Semarang,
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Anthony J. Catanese dan James C. Snyder, 1989, *Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta.
- A.P Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997*, Mandar Maju, Bandung.
- Arthur B. Gallion dan Simon Eisner, 1996, *Pengantar Perancangan Kota Desain dan Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta.
- B.Hestu Cipto Handoyo, 1993, *Aspek-aspek Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Ruang*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Budi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darji Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 2005, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung.
- Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita, 2005, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugujogia Pustaka, Yogyakarta.
- Imam Koeswahyono, dan Anshari Tunggul, 1999, *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria Di Indonesia*, IKIP Malang, Malang.
- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- J.J.J M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jhon Salindo, 2007, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Lexy Moeleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Rasyidi, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad Yamin dan Chadidjah Dalimunthe, 2006, *Modul Hukum Agraria*, Medan.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R.Subekti, 2002, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramli Zein, 1995, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedjono dan H. Abdurrahman, 2008, *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- W. Fiedmann, 1990 *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin (dari judul asli: Legal Theory), CV. Rajawali, Jakarta.
- Yasin Gadhi, 1994, *Al-amwal wa Al-amlak al-'ammah fil islam*, mu'assasah raam, jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;

Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS;

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan HGB (Hak Guna Bangunan) atau HP (Hak Pakai) atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi Hak Milik;

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Tempat Tinggal;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031.

C. Sumber lain

[Http://andinuzul.wordpress.com/2009/02/25/kesadaran-hukum-landasan-memperbaiki-sistem-hukum/](http://andinuzul.wordpress.com/2009/02/25/kesadaran-hukum-landasan-memperbaiki-sistem-hukum/) akses internet tanggal 23 Mei 2016